

**LAPORAN HASIL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA MITRA**



**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA
TERPADU MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN MEDIA
KOMUNITAS LOKAL PADA KELOMPOK RELAWAN TANGGAP BENCANA
COVID-19 DI KABUPATEN SUMENEP**

Oleh

Yetti Hidayatillah, M.Pd 0711028901 (ketua pengusul)
Matroni, M.Hum 0703038405 (anggota pengusul)

**STKIP PGRI SUMENEP
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Terpadu Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Media Komunitas Lokal Pada Kelompok Relawan Tanggap Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sumenep

Peneliti
Nama lengkap : **Yeti Hidayatillah, M.Pd**
Perguruan tinggi : STKIP PGRI Sumenep
NIDN : 0711028901
Jabatan fungsional : Asisten Ahli / IIIb
Program Studi : PPKn
Nomor HP :
Alamat surel : yetihidayatillah@stkipgrisumenep.ac.id

Anggota(I)
Nama lengkap : **Matroni, M.Hum**
NIDN : 0703038405
Perguruan tinggi : STKIP PGRI Sumenep

Institusi Mitra
Nama Institusi Mitra : **Relawan Tanggap Bencana Covid-19**
Alamat mitra : Desa Bluto, Batang-batang dan Desa Saronggi
Penanggungjawab :
Tahun Pelaksanaan : tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya tahun berjalan : Rp. 7.000.000
Biaya keseluruhan : Rp. 7.000.000

Sumenep, 20 Mei 2020

Ketua Pelaksana



Mengetahui,
Ketua STKIP PGRI Sumenep

Dr. Asmoni, M.Pd
NIK. 07731015

Yeti Hidayatillah, M.Pd
NIDN. 0711028901



Kepala LPPM
STKIP PGRI Sumenep

Mulyadi, M.Pd
NIK. 07731135

RINGKASAN

Banyaknya kasus yang terus bertambah selama hampir dua tahun ini menunjukkan bahwa Covid-19 bukanlah masalah biasa, melainkan adalah ancaman nyata yang bisa menyerang kapan saja dan dimana saja. Tidak terkecuali di Kabupaten Sumenep yang kasusnya juga masih relatif tinggi. Berdasarkan data kementerian kesehatan, hingga tanggal 6 September 2021, kasus positif virus corona di Indonesia berjumlah 4.133.433, yang meninggal 136.473 orang, dan yang sembuh 3.850.689 orang. Sementara jumlah kasus seluruh dunia sebanyak 221.638.460 kasus positif, 4.583.345 kasus meninggal dunia, dan yang sembuh 198.152.470 orang. Tingginya kasus penyebaran covid 19 di Indonesia dan dunia pada umumnya tentu menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan bangsa. Bagaimanapun juga, upaya-upaya efektif dalam menyikapi pandemi covid 19 perlu dilakukan agar wabah global ini segera berakhir dan kehidupan kembali berjalan normal seperti biasa.

Oleh karena itu, PKM dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Terpadu Melalui Penguatan Kelembagaan Dan Media Komunitas Lokal Pada Kelompok Relawan Tanggap Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sumenep”, ini diharapkan dapat meningkatkan peran perguruan tinggi dalam mendukung program pemerintah kabupaten Sumenep, khususnya dalam menyikapi problem covid 19. mudah-mudahan bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin, dan besar harapan proposal penelitian ini dapat diterima.

Kata kunci : Pemberdayaan, Mitigasi, Relawan Covid-19

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Virus corona yang melanda dunia pada tahun 2019 telah menyita berbagai belahan dunia. Wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 pada perkembangannya menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China.

Sejak Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi atau penyakit global. Membuat masyarakat mengalami kepanikan, ketakutan dan kecemasan yang mengancam hidupnya. Sepanjang berjalannya peristiwa bencana wabah virus corona di Indonesia, sejak maret lalu, kebijakan dan pola komunikasi pemerintah banyak disorot oleh berbagai kalangan, termasuk dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan penilaian negatif, yaitu Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF). Penilaian negatif LP3ES terhadap komunikasi media pemerintah terkait pandemi Covid-19 diberikan karena pemerintah mengeluarkan 37 pernyataan blunder selama pandemi Covid-19 (Mawardi, 2020). Sementara penilaian negatif diberikan INDEF berdasarkan hasil survei yang menyatakan 66,28% masyarakat memperlihatkan respons negatif terhadap komunikasi yang dilakukan pemerintah, khususnya komunikasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan (Indraini, 2020).

Kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dan Pemerintah berupaya untuk dapat mengendalikan laju peningkatan penyebaran penyakit dan peningkatan kematian akibat COVID-19. Kasus harian Covid-19 di Jawa Timur terus melonjak. Data terakhir Kemenkes pada rabu (14/7/2021) menyebutkan, ada penambahan sebanyak 7.088 kasus baru di Jatim. Dengan penambahan ini jumlah total kasus positif di Jatim sebanyak 210.460 (liputan 6). Sementara itu, situasi Covid-19 di Jawa Timur data nasional pukul 16.00, tanggal 13 Juli 2021, kasus baru +6.269, Sembuh + 2.131, Meninggal +179 (AntaraNews).

Berbagai upaya dalam rangka menekan laju pertumbuhan penyebaran wabah ini terus dilakukan. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan COVID-19 ini adalah di disamping difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial juga difokuskan pada angka partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi nasional sebagai bentuk pencegahan diri dari potensi penyebaran virus tersebut. Sebagaimana dilansir di Kominfo.go.id, dalam menanggulangi atau mencegah merabaknya wabah virus corona, Pemerintah menetapkan tiga kerangka strategi dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, yakni deteksi, terapeutik, dan vaksinasi. Strategi ini dijalankan sesuai dengan petunjuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan jumlah pengetesan dan pelacakan menjadi tiga sampai empat kali lipat dari sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Negara-negara lainnya yang memiliki angka kasus Covid-19 tinggi. Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pengetesan epidemiologis atau dikhususkan untuk suspek atau orang yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19.

Seiring dengan strategi diatas, dampak yang ditimbulkan dari wabah tersebut sangat luar biasa diberbagai sektor. Tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi namun pada aspek lain semisal bidang sosial, pendidikan dan kehidupan politik suatu Negara. Pada aspek politik, pertama kali wabah pandemi melanda dunia, berbagai spekulasi bernuansa politik pun hampir mengarah pada Negara yang pertama kali menjadi titik penyebaran wabah covid-19. Adalah merupakan Negara cina yang pertama kali menjadi Negara turut bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan tersebut. Media internasional pun menyorot berbagai adanya konspirasi besar Negara cina atas spekulasi yang berkembang yang kemudian meminta lembaga kesehatan

dunia (WHO) untuk melakukan investigasi atas lonjakan kasus kematian akibat wabah virus tersebut.

Kendala lain juga tidak luput dari perhatian public adalah semakin liarnya konten dan berita hoax terkait program vaksinasi yang dianggap berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan warganegara. Spekulasi dan pemberitaan negative semakin liar beredar seiring dengan lambannya dalam penanganan bencana yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pada bulan Maret 2020, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respons yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Terdapat lima hal yang digugat oleh Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintah yaitu (1) memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respons yang cepat, akurat, dan bertanggungjawab; (2) membenahi manajemen komunikasi publik; (3) menjaga hak privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien; (4) meminimalisir stigma dan diskriminasi; dan (5) mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau.

Pembentukan satgas penanggulangan bencana covid sampai pada pengurangan aktifitas sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas pun ditempuh. Namun upaya dan ikhtiar pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kemauan bersama masyarakat. penyekatan aktifitas sosial masyarakat yang kemudian beberapa lembaga kepolisian, menteri perhubungan maupun kalangan TNI dilakukan dalam rangka mengurangi lonjakan kasus penyebaran covid 19 ini.

Hampir 2 tahun berjalan bencana wabah ini berlangsung pergerakan lonjakan kasus positif mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika sosial masyarakat. di tengah upaya pemerintah melakukan ikhtiar dalam rangka menekan lonjakan kasus tersebut, tingkat kejenuhan sosial pada masyarakat juga tidak bisa kita abaikan akibat meluasnya efek keberadaan bencana tersebut. Melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional ditandai dengan menurunkan tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat didalamnya serta peningkatan jumlah PHK karyawan pada beberapa perusahaan hingga bangkrutnya salah satu toko ritel modern beberapa waktu lalu adalah fenomena serius yang tidak bisa diabaikan dalam konteks upaya mitigasi secara dini atas bencana ini. Pada sektor pendidikan pun juga tidak luput dari dampak dari kebijakan pengurangan aktifitas sosial. Perubahan kelas yang dilakukan dengan tatap muka harus dilakukan secara daring guna mencegah aktifitas berkerumun warga. Namun ditengah pengurangan aktifitas warga diberbagai lembaga-lembaga tersebut juga tidak jarang banyak ditemukan tingkat stress warga dan kalangan pelajar. Berbagai aktifitas demonstrasi warga menolak perpanjangan pembatasan sosial sering terjadi diberbagai tempat sepanjang wabah ini berlangsung selama 2 tahun terakhir.

Lambannya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menuai banyak kritik. Disamping tudingan lambannya dalam penanganan bencana juga tidak transparannya data yang dirilis ke publik, hingga termasuk salah satu negara dengan kinerja paling buruk dalam mengatasi COVID-19 bila dibandingkan dengan negara lain. Lambannya penanganan bencana covid-19 tersebut mendorong langkah inisiatif masyarakat sipil. Pembahasan mengenai masyarakat sipil dalam konteks pandemi COVID-19 sangat relevan terutama bagaimana peran kelompok relawan dalam mendorong program pemerintah dalam rangka mengatasi bencana ini. Salah satu negara yang cukup berhasil menekan lonjakan kasus covid-19 adalah negara korea selatan. Pemerintah korea selatan bersinergi dengan masyarakat sipil untuk mengatasi wabah dan bahkan menjadi salah satu negara terbaik dalam melawan persebaran virus tersebut.

Selain upaya advokasi kepada pemerintah, kelompok masyarakat sipil keagamaan yang sudah mapan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bergerak secara nyata di tengah masyarakat. Kedua organisasi tersebut membentuk gugus tugas penanggulangan COVID-19, mengerahkan produsen untuk memproduksi masker yang kemudian dibagikan secara gratis, memanfaatkan secara optimal rumah sakit milik organisasi masing-masing, memberikan bantuan pangan ketika pemerintah belum bergerak, dan memberikan edukasi tentang protokol

kesehatan untuk mencegah penularan yang semakin meluas. Kesemuanya dilakukan dua organisasi ini hingga ke level desa, menyentuh masyarakat akar rumput.

Di lain pihak, sebagian kelompok masyarakat sipil yang lebih kecil dibanding NU dan Muhammadiyah menunjukkan solidaritasnya dengan menggalang dana. Salah satunya dilakukan melalui wadah urun dana (*crowdfunding*) seperti kitabisa.com. Tidak hanya organisasi masyarakat sipil, tetapi banyak juga individu figur publik seperti pekerja seni dan 'influencer' media sosial melakukan hal yang sama. Per 30 April 2020, penggalangan dana terkait COVID-19 di wadah urun dana tersebut telah mencapai lebih dari 25 miliar rupiah. Penggalangan dana itu dimaksudkan untuk beragam tujuan, misalnya membeli alat Perlindungan Diri (APD) para tenaga medis, penyediaan tempat singgah untuk tenaga medis, hingga bantuan pangan untuk masyarakat yang terdampak krisis akibat wabah ini. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa dalam konteks mengatasi pandemi COVID-19, masyarakat sipil Indonesia tergolong sebagai masyarakat sipil yang kuat (*strong civil society*). Masyarakat sipil yang kuat adalah situasi dimana warga aktif dan memiliki kapasitas untuk mengorganisir dan menggerakkan dirinya dalam perjuangan mempertahankan kepentingannya. Dalam hal ini, masyarakat sipil Indonesia menggerakkan diri demi kepentingan untuk bertahan di tengah pandemi baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi, serta membantu satu sama lain.

Di sisi lain, pemerintah berjalan inefektif (*ineffective governance*). Terdapat empat hal yang mengindikasikan hal tersebut. Pertama, tidak terlihat ada upaya dari pemerintah untuk mengarahkan masyarakat sipil dan mengintegrasikannya menjadi sebuah gerakan yang sinergis. Jikapun ada, belum mencapai tujuan yang dimaksud. Seperti yang pernah dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 dengan mengumpulkan para wakil lembaga dan 'influencer' yang berhasil menggalang dana pada tanggal 20 Maret 2020 di Gedung BNPB, Jakarta. Dalam laman media sosial Instagram pribadinya, Rachel Vennya, seorang influencer dengan jumlah penggalangan dana untuk COVID-19 terbanyak di Indonesia, mengindikasikan ketidakpuasannya terhadap pertemuan itu. Pasca pertemuan itu, ia masih mempermasalahkan data pemerintah yang masih tertutup, karena menurutnya penyaluran bantuan akan lebih optimal dan tepat sasaran apabila ada data yang valid dan transparan.

Kedua, persoalan data ini pula yang dipermasalahkan oleh para akademisi yang berlomba-lomba membuat kajian mengenai penanggulangan COVID-19. Keraguan pada data yang dirilis oleh pemerintah dan kesulitan dalam mengaksesnya membuat studi yang dilakukan oleh para akademisi itu seringkali menggunakan bahan riset COVID-19 asal luar negeri. Padahal, data yang berasal dari Indonesia sendiri akan meningkatkan validitas hasil kajian-kajian yang dilakukan. Ketiga, lebih jauh daripada sekadar tidak menyediakan data secara terbuka, pemerintah cenderung membuat kebijakan tidak berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai universitas itu. Bahkan, beberapa pihak menyebut pemerintahan Joko Widodo berlaku anti-scientism dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Pernyataan wakil pemerintah seringkali tidak sejalan satu sama lain di media karena tidak diketahui basis pengetahuan apa yang mendasari kebijakan yang dilakukan untuk menekan laju wabah. Keempat, alih-alih berusaha merangkul pihak eksternal pemerintah seperti gerakan masyarakat sipil, pemerintah masih mengalami masalah dalam koordinasi internal dengan instansi vertikalnya sendiri, yaitu pemerintah daerah. Maraknya 'lockdown' yang dilakukan oleh lingkungan terkecil warga di berbagai daerah salah satunya disebabkan oleh ketidakjelasan pemerintah pusat dalam mengkomunikasikan kebijakan ke level bawah sehingga memaksa masyarakat untuk melakukan tindakan sendiri.

Ketika situasi masyarakat sipil yang kuat terus-menerus dihadapkan dengan pemerintahan yang inefektif, dapat memunculkan dua hal. Pertama, pemerintahan 'alternatif' dimana masyarakat sipil justru mengambil alih tugas pemerintah dalam menangani pelayanan publik. Kedua, dalam jangka panjang, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah akan mengurangi modal sosial untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dari masyarakat dan akan kontraproduktif bagi proses demokratisasi di Indonesia. Hal kedua ini yang lebih tampak dapat menimbulkan resistensi dan konflik, dan di masa depan akan memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah.

Dari pemaparan di atas, cukup jelas bahwa ketidakmampuan pemerintah dan tidak adanya komitmen yang kuat untuk mengarahkan dan mengintegrasikan gerakan masyarakat sipil sebagai sebuah kebijakan yang terarah, akan semakin memperlambat efektifitas dan efisiensi kinerja dalam mengatasi efek pandemi COVID-19. Dari data yang ditampilkan oleh pemerintah saat ini, Indonesia belum terlihat mencapai puncak penyebaran virus, apalagi memprediksi secara keyakinan penuh bahwa pandemi ini akan segera selesai. Oleh karena itu, menjadi hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mulai menerapkan participatory governance dengan merangkul gerakan masyarakat sipil (dan pihak swasta) guna mengatasi pandemi COVID-19 secara lebih cepat, tepat, dan sinergis. Jangan sampai kita menghadapi badai yang sama, namun tidak dalam satu perahu. (Dini Suryani)

Selain itu, sangat penting keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang lokasi penyebaran, ciri-ciri atau karakteristik virus corona perlu disampaikan kepada masyarakat secara detail, jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Sebab keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci untuk menekan penyebaran atau penularan Covid-19. Ditengah kondisi yang sangat mencemaskan ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang benar bukan informasi yang sifatnya menakut-nakuti masyarakat (pembaca). Apalagi di sosial media, banyak berita bertebaran yang menginformasikan bahwa Covid-19 dapat bertahan di udara hingga 3 jam. Meski ada yang membantah kalau penularan tidak bisa terjadi melalui medium udara, melainkan melalui cairan batuk maupun bersin yang disebut droplet. Bahkan ada yang mengatakan untuk menangkal Covid-19 bisa dilakukan dengan cara berjemur di pagi hari. Keterangan tersebut juga ada yang membantah dengan menjelaskan bahwa waktu berjemur yang baik yakni pukul 10 pagi, bukan di pagi hari. Ada baiknya ditegaskan dari awal bahwa studi semacam ini pun tak lepas dari bias, kekeliruan penafsiran yang senantiasa lekat dengan watak ilmu-ilmu sosial berarti juga watak manusia. Penelitian ini menyoroti soal bagaimana komunikasi publik yang dilakukan.

Menurut Breakwell (Dalam Rod, S.K., *BotanCarl*, *Holen Are Risk Communication and the willingness to follow evacuation instructions in a natural disaster*, *Health, Risk & Society*, Vol. 14, No. 1, February 2012, 87-99, Routledge. 2012: 4), alasan utama untuk mengkomunikasikan risiko sebelum, selama dan setelah bencana alam adalah untuk memulai dan melakukan tindakan protektif langsung. Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tetapi juga penting pada saat pra bencana maupun pasca bencana. Mempersiapkan masyarakat di daerah rawan bencana tentu harus senantiasa dilakukan. Selain informasi yang memadai tentang potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Harus diingat, informasi berlimpah saja tidak cukup untuk menyadarkan warga atas bahaya bencana yang mengancam. Cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat. Kekeliruan dalam mengomunikasikan sebuah informasi bisa menimbulkan ketidakpastian yang dapat memperburuk situasi. Terlebih, ini berkaitan dengan penyintas dan situasi bencana, seperti soal penanganan tanggap bencana Covid-19 di Kabupaten Sumenep yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan ini

B. Permasalahn Mitra

Penguatan partisipasi masyarakat kalangan relawan tanggap bencana Covid-19 di Kabupaten Sumenep diduga masih lamban dalam penanganan bencana. Dalam melakukan pengerahan atau mobilisasi sumber daya (dalam hal ini relawan) untuk penanganan tanggap darurat bencana, biasanya instansi maupun lembaga atau organisasi terkait harus didampingi oleh personil instansi atau lembaga asal, dan penyerahannya dilengkapi administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumber daya yang dibutuhkan, BPBD maupun BNPB sesuai tingkat kewenangannya berkewajiban membantu atau mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target

Target pengabdian pada masyarakat adalah terbinanya kesadaran dan pemahaman para relawan akan prinsip dan cara kerja mitigasi bencana secara dini dalam menghadapi wabah covid-19 di kabupaten sumenep

B. Luaran

Sosialisasi, pelatihan sekaligus pendampingan yang dilakukan bagi mitra diharapkan mampu memberikan pemahaman, peningkatan kesadaran akan pentingnya manajemen perlindungan diri sedini mungkin guna mencegah penularan wabah virus covid-19 di kabupaten Sumenep.

BAB III METODE PELAKSANAAN

A. Waktu dan tempat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan selama 8 (enam) bulan, dimulai dari 20 februari sampai dengan 30 Oktober 2020. Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di tiga lokasi yakni: 1) Desa Bluto, Kecamatan Bluto; 2) Desa Batang-batang, Kecamatan Batang-batang; dan 3) Desa Saronggi, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa timur.

B. Metode pelaksanaan

Metode pendekatan yang ditawarkan dalam mengatasi berbagai permasalahan mitra adalah melalui pembinaan yang terintegrasi dengan konsep mitigasi. pelatihan menghasilkan model pengelolaan manajemen secara terpadu dan terarah sehingga bencana akan dengan mudah ditangani sedini mungkin oleh masyarakat dan relawan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah penyusunan buku panduan dengan bahasa yang sederhana

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

1. Kualifikasi tim pelaksana kegiatan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP PGRI Sumenep memiliki motivasi kuat dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai pusat layanan yang dimilikinya, antara lain Pusat Studi Kebijakan, Pusat Layanan KKN dan KKL, dan Pusat Layanan Kewirausahaan dan Konsultasi karir. Jumlah kegiatan LPPM dosen STKIP PGRI Sumenep dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, LPPM telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian dengan memberdayakan potensi stakeholder dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data base LPPM tahun 2011, terdapat 57 kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan baik dengan pendanaan dari DIPA lembaga maupun dari DP2M Dikti dengan besaran dana Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-. Berdasarkan capaian yang diperoleh LPPM STKIP PGRI Sumenep dapat dikategorikan sebagai bentuk kinerja yang sangat membanggakan dan akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja LPPM kedepannya.

Dalam program penerapan IPTEKS bagi masyarakat ini diperlukan kepakaran yang mengetahui tentang berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi mitra. Berdasarkan analisis situasi yang ada, maka permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman akan urgensi pengelolaan pasar tradisional ramah lingkungan.

2. Pembagian tugas tim pelaksana kegiatan

Dalam rangka kelancaran dan kesuksesan kegiatan pengabdian pada masyarakat kelompok pengrajin khas Buleleng , maka dilaksanakanlah pembagian tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pelaksana secara umum akan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan hasil pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan pasar ramah lingkungan.
2. Anggota tim pelaksana sebagai anggota tim pelaksana yang memiliki keahlian dibidang pendidikan akan bertanggung jawab memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok relawan.
3. DR. Nurliana indah, Sp.PD-KPTI., merupakan narasumber ahli yang kami undang dan memiliki keahlian dibidang penyakit menular dimana tugasnya akan memberikan materi dan pendampingan terhadap masyarakat dan kelompok relawan

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

A. Pola Komunikasi Kebencanaan di Kecamatan Batang-batang dan Kecamatan Bluto

Salah satu faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik adalah komunikasi (Ramadani, 2019). Mengutip McBeth, Lybecker dan Stoutenborough dalam Ramadani (2019), *"In today's policy world, communication is a key element of policy making"*. Komunikasi publik kehumasan pemerintah menjadi krusial. Lee dalam Lee, Neeley, & Stewart (2012), menjelaskan bahwa fungsi kehumasan terkait dengan pemaparan visi, misi, tujuan atau kebijakan pemerintah. Aktivitas kehumasan pemerintah tersebut diantaranya pelaporan pertanggungjawaban terhadap publik, edukasi dan kampanye layanan publik. Grunig dan Hunt (dalam Haryanti & Rusfian (2018), mengembangkan 4 model kehumasan strategi komunikasi publik pemerintah, yaitu: (1) Model Publisitas (press agency). Model ini menempatkan humas sebagai agen press yang membuat berita untuk mempengaruhi publik, melalui promosi, publisitas, manipulasi, propaganda. Kebenaran tidak terlalu dibutuhkan. Model ini biasa digunakan dalam komunikasi bisnis; (2) Model Informasi Publik. Model ini mendasarkan pada proses komunikasi satu arah untuk menyampaikan informasi, bukan membujuk atau mempengaruhi publik. Model ini diterapkan dalam komunikasi pemerintah. Komunikator berperan sebagai jurnalis untuk menyebarkan informasi; (3) Model The two-way asymmetric. Model ini mendasarkan pada proses komunikasi dua arah, feedback, persuasi dan perubahan perilaku publik. Digunakan dalam periklanan, pemerintahan, politik, kampanye dan edukasi publik. Komunikator menggunakan data ilmiah untuk meyakinkan atau mempengaruhi publik; (4) Model The two-way symmetric. Model ini bertujuan mengubah perilaku. Ada dialog, pertukaran ide, sikap dan perilaku untuk mengakomodir kebutuhan dan mencapai kesepakatan. Paisley dalam Rice & Atkin (2001) memaparkan komunikasi publik terkait: (1) Tujuan komunikasi untuk mengubah kepercayaan, perilaku dan kontrol sosial; (2) Metode yang digunakan, seperti media massa, online, iklan, poster, brosur, mural, dan sebagainya; (3) Pembaruan atau perubahan untuk lebih baik. Media sosial menjadi platform populer yang memberikan dampak besar dalam proses komunikasi. Haryanti & Rusfian (2018) menjelaskan bahwa media sosial menjadi saluran komunikasi publik utama yang membuka kesempatan berbagi informasi, perubahan, arena pertemuan berbagai kelompok. Juga untuk diseminasi informasi, mobilisasi komunitas, penyelenggaraan layanan, kolaborasi publik, transparansi informasi, edukasi, kampanye, dan manajemen kebencanaan. Media sosial dapat digunakan untuk membangun reputasi, citra, manajemen krisis, manifestasi partisipasi publik. Khan dikutip Haryanti & Rusfian (2018) menjelaskan bahwa komunikasi publik pemerintah hendaknya tidak terbatas menggunakan media sosial semata, namun harus mampu membangun budaya sharing, transparansi, keterbukaan (*openness*) dan kolaborasi (*STOC culture*).

Istilah komunikasi bencana belum menjadi konsep populer dalam bidang komunikasi maupun bidang kebencanaan. Meski penelitian komunikasi bencana sendiri telah banyak dilakukan, namun di Indonesia kajian komunikasi terkait bencana baru banyak dilakukan setelah peristiwa bencana alam gempa dan tsunami Aceh tahun 2014. Meski demikian, kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam penanganan bencana semakin tinggi belakangan ini. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat

diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana.

Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana¹.

Penanggulangan bencana, harus didukung dengan berbagai pendekatan baik soft power maupun hard power untuk mengurangi resiko dari bencana. Pendekatan soft power adalah dengan mempersiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana. Sementara hard power adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik seperti membangun sarana komunikasi, membangun tanggul, mendirikan dinding beton, mengeruk sungai dll. Dalam UU, dua hal ini yang disebut mitigasi bencana. Pada dua pendekatan inilah, komunikasi bencana amat dibutuhkan.

Menurut Haddow dan Haddow terdapat 5 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu²:

1. *Customer Focus*, yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat.
2. *Leadership commitment*, pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.
3. *Situational awareness*, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci.
4. *Media partnership*, media seperti televisi, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerjasama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang terlatih untuk bekerjasama dengan media untuk mendapatkan informasi dan menyebar-kannya kepada publik.

Permasalahan komunikasi media yang efektif pada pandemic Covid-19 adalah kapan pemerintah harus memperhatikan efektivitas komunikasinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam manajemen komunikasi pada masa krisis dikenal adanya empat tahapan, yaitu: prodromal, akut, kronis, dan resolusi. Tahap prodromal mulai ketika ada tanda-tanda munculnya krisis. Tahap akut adalah pada saat diumumkan terjadinya krisis, merupakan tahap terpendek. Tahap kronis adalah selama masa terjadinya krisis. Tahap resolusi adalah tahap dimana krisis sudah mereda. Pada keempat tahap itu, kelima kunci komunikasi media yang efektif harus terpenuhi untuk mencapai komunikasi media yang efektif selama masa pandemi Covid-19.

Komunikasi media yang efektif pada pandemi Covid-19 menurut Matthew Seeger sebagaimana dikemukakan *The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* mensyaratkan lima kunci, yaitu sumber informasi yang kredibel, kejujuran dan keterbukaan informasi, bertujuan membujuk orang mengambil tindakan yang mengurangi bahaya tertular, disusun berdasarkan pendapat para ahli, bukan amatiran, dan konsisten (Seeger, 2020).

Isu komunikasi dalam manajemen bencana yang dipaparkan oleh Shaw dan Gupta³ dalam HH (2012). Shaw dan Gupta lebih fokus menyoroti aspek komunikasi,

¹ Haddow, G. D, dan Kims. 2008. Disaster Communications, In A Changing Media World. London. Elsevier, P. xiv

² *Ibid.* p. 2

namun sebenarnya ada implikasi lebih ketika kita menghubungkan antara siklus manajemen komunikasi dan aspek komunikasi, yaitu dimensi informasi, koordinasi dan kerjasama. Tahap sebelum kejadian bencana maka aspek komunikasi akan mencakup informasi yang akurat, koordinasi dan aspek kerjasama terutama kepada masyarakat yang

rentan atas peristiwa bencana. Tahap kejadian bencana keempat aspek : komunikasi, informasi, kerjasama dan koordinasi merupakan kunci sukses penanganan bencana terutama untuk penanganan korban dan menghindari resiko lebih lanjut. Pada tahap setelah bencana rekonstruksi dan pemulihan pasca situasi bencana adalah tahap penting untuk membangun kembali korban bencana dan memastikan untuk mengurangi resiko apabila terjadi peristiwa serupa dikemudian hari.

Hal yang sangat penting adalah mitigasi, dalam tahapan ini, seluruh potensi komunikasi menjadi penting untuk memastikan pencegahan dan pengurangan resiko, yang tentu pendekatan yang tepat adalah komprehensif, sistemik dan terintegrasi antar lembaga, komponen maupun berbagai pihak yang ada. Secara lebih luas, selain lembaga yang menangani bencana (BNPB), keterlibatan stakeholder seperti media, industri, politisi dan berbagai komponen masyarakat/lembaganya menjadi sangat penting. Sedemikian penting agar keterlibatan mereka terutama pada peristiwa bencana dan juga pada mitigasi, tahap pemulihan, tidak digunakan sebagai ajang pencitraan – yang akhirnya menjadikan bencana dan korban bencana sebagai obyek semata, namun justru secara substansial memang membantu korban bencana dan meminimalisasi resiko yang ada/ yang akan terjadi.

Pemberitaan di media atas bencana letusan gunung Merapi di sisi lain juga sempat menunjukkan adanya tumpukan bantuan yang mubazir, karena tumpang tindih dan system informasi yang tidak baik, atau sebaliknya kejadian bencana gempa di Mentawai dan banjir di Wasior Papua, juga menunjukkan gambaran aspek komunikasi dan informasi yang belum berjalan dengan baik karena mengakibatkan keterlambatan penanganan, termasuk bantuan pada korban. Komunikasi bencana sangat dibutuhkan dalam keadaan bencana dari mulai pra bencana, bencana terjadi dan pasca bencana. Komunikasi merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan guna mencapai kesuksesan dari proses penanggulangan bencana seperti mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan mengkomunikasikan berbagai macam pesan tentang bencana kepada publik baik pemerintah, media dan masyarakat dapat mengurangi resiko bencana, menyelamatkan nyawa dan dampak dari bencana tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah membawa pergeseran paradigma dalam penanggulangan Berdasarkan model diatas dijelaskan bahwa komunikasi bencana sangat diperlukan dalam penanganan penanggulangan bencana di Indonesia dari mulai sebelum bencana (mitigasi bencana), saat bencana (respon), dan sesudah bencana dari hanya menanggapi situasi saat bencana terjadi (tanggap darurat) ke pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapat sebuah model komunikasi bencana dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Berikut model komunikasi menurut Jaelani (2019) bencana (pemulihan).

Proses penanggulangan bencana di Indonesia ada beberapa stakeholder yang dilibatkan meliputi pemerintah, masyarakat, media dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam penanggulangan bencana khususnya media sebagai penyampai informasi dari lokasi bencana kepada publik. Selain itu, komunikasi menjadi elemen yang sangat penting dalam proses tersebut, sehingga komunikasi bencana dapat dijadikan sebagai sistem penanggulangan di Indonesia. Salah satu bencana dalam skala besar yang terjadi di Indonesia adalah tsunami dan gempa bumi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jeanne Branch Johnston

³ Shaw , dkk (Eds), 2009, *Urban Risk Reduction: An Asian Perspective*, Emerald Group Publishing Limited. P. 59

dari University of Hawaii dengan judul *Personal Account From Survivor of the Hilo Tsunami 1946 and 1960: Toward A Disaster Communication Models*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengakuan personal para korban selamat dari bencana tsunami di Hilo pada tahun 1946 dan 1960. Penelitian ini menemukan bahwa pada bencana tsunami di Hilo tahun 1946 dan 1960 terjadi kesalahan prosedur dan koordinasi pemerintah dalam mengantisipasi bencana tsunami. Pihak berwenang dalam hal ini dinas pertahanan sipil, kepolisian di Hawaii dan Hilo mengalami miskomunikasi dan koordinasi sehingga pemberitahuan informasi kepada warga Hilo terlambat diberitakan. Selain itu ditemukan bahwa media massa melakukan kesalahan dalam menyampaikan berita kepada publik tentang tsunami. Media massa menyampaikan berita melalui radio di Hawaii bahwa tidak akan ada gelombang tsunami dalam satu jam ke depan. Kemudian dari data yang diperoleh menyatakan bahwa masyarakat Hawaii memiliki pengetahuan yang sangat rendah tentang bencana tsunami. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu sebab banyaknya korban yang tewas pada dua bencana alam tersebut. Johnston (2013). Penelitian di atas pernah terjadi di Indonesia yaitu tsunami Aceh. Tsunami Aceh merupakan salah satu bencana skala besar yang terjadi di Indonesia dan keadaan pemerintah, masyarakat dan media hampir sama dengan penelitian di atas. Sehingga penanggulangan bencana tsunami Aceh memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bencana sangat penting agar tidak adanya kesalahan informasi bencana yang akan disampaikan kepada masyarakat (publik), peran media massa yang sangat vital sebagai penyampai informasi dan pihak pemerintah dalam memutuskan kebijakan penanggulangan bencana yang terjadi. Coppola dan Maloney menyatakan bahwa manajemen bencana modern secara komprehensif mencakup empat komponen fungsional, yaitu⁴:

1. *Mitigation*, yang mencakup reduksi atau mengeliminasi komponen resiko bahaya. Menurut *World Development Reports* (dalam Owolabi dan Ekechi, 2014), mitigasi melibatkan peninjauan kode bangunan, pemutakhiran analisis kerentanan, penzanaan dan pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, peninjauan peraturan penggunaan bangunan dan kode keselamatan, serta penerapan langkah-langkah pencegahan kesehatan. PAHO (2000) menambahkan bahwa mitigasi juga mensyaratkan mendidik komunitas bisnis tentang langkah yang harus diambil untuk mendiversifikasi lini bisnis sehingga meminimalkan kerugian ekonomi ketika terjadi bencana.
2. *Preparedness*, yang meliputi melengkapi masyarakat yang memiliki resiko terkena bencana atau menyiapkan agar mampu membantu orang pada peristiwa bencana dengan berbagai alat-alat/ perlengkapan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan meminimalisasikan resiko finansial serta resiko lainnya. Menurut World Health Organisation (2007), kesiapsiagaan adalah berbagai program pra-bencana yang memperkuat kemampuan personel, meningkatkan upaya teknis dan manajerial pemerintah, Internasional organisasi, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, media, badan ilmiah dan komunitas rawan bencana merespons dengan memuaskan situasi darurat dan bencana. Proses kesiapsiagaan antara lain meliputi perencanaan, pelatihan personel darurat, peringatan sistem, sistem komunikasi darurat, rencana evakuasi dan pelatihan, inventarisasi sumber daya, daftar kontak personel darurat dan informasi public (ISDR, 2008; Ulari, 2013)
3. *Response*, mencakup tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak bencana. Respon dan respon kegiatan terdiri dari memberikan peringatan dini kepada orang-orang di sekitar daerah rawan bencana, evakuasi korban, pencarian dan penyelamatan, penilaian dampak, logistic dan distribusi bantuan, mengamankan daerah dan orang-orang yang terkena dampak, rehabilitasi dan rekonstruksi (Hodgson dan Palm, 1992; Stephenson dan Du Franc, 2002)

⁴ Setio, H. H. B (ed). 2011. *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo. P. 45

4. *Recovery*, mencakup perbaikan, rekonstruksi atau mencapai kembali dari apa yang telah rusak/ hilang sebagai bagian dari bencana dan idealnya mengurangi resiko dari kekacauan yang sama dimasa depan. Tanggap bencana dan pemulihan adalah tindakan langsung keseluruhan yang diambil oleh pemerintah, lembaga dan profesional manajemen bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana sampai solusi yang lebih permanen dan berkelanjutan diselesaikan (Warfield, 2008; Khan dan Khan, 2008).

Keempat komponen tersebut yang saat ini menjadi platform dalam melakukan penanganan bencana, menjadi dasar untuk melakukan dari operasional lapangan sampai ke pembuatan kebijakan dan strategi penanganan bencana.

B. Strategi Komunikasi Efektif Kelompok Relawan di Kecamatan Bluto dan Kecamatan Batang-Batang Dalam Masa Pandemi Covid 19

Dewasa ini keberadaan komunikasi sebagai sebuah ilmu dan aktivitas semakin disadari teramat penting. Sebagai manusia yang hidup dan berinteraksi dengan orang lain, komunikasi selalu dibutuhkan. Sejak manusia dilahirkan, komunikasi telah dilakukan begitu seterusnya hingga masa akhir kehidupan. Dengan demikian kita dapat mengatakan komunikasi merupakan aktivitas yang tidak bisa ditiadakan selama manusia hidup. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ruben dan Steward bahwa tidak ada kegiatan yang lebih mendasar untuk kehidupan kita secara pribadi, sosial atau professional kecuali komunikasi⁵.

Lebih lanjut Ruben dan Steward mengatakan “Kesadaran bahwa komunikasi merupakan proses yang mendasar, mau tidak mau menyiratkan bahwa hal itu mudah dipahami atau dikendalikan. Sebaliknya, komunikasi itu sangat kompleks dan memiliki banyak bentuk. Banyak contohnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, profesional, teknologi, nasional ataupun tradisional. Penegasan tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia juga disampaikan oleh Scheidel dalam Mulyana yang mengemukakan “Bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Namun menurut Sheidel tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologis kita”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka komunikasi dapat dikatakan sebagai perilaku atau aktivitas manusia yang utama dalam kehidupannya di muka bumi. Tidak mungkin manusia tidak melakukan kontak sosial dengan orang lain dan lingkungannya. Itu semua tentu saja dilakukan dengan komunikasi. Selain merupakan aktivitas mendasar dalam kehidupan manusia, komunikasi juga memiliki tujuan penting untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan manusia serta untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi, yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi hubungan untuk melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain⁶.

Terkait dengan fungsi hubungan, komunikasi adalah jalur yang menghubungkan manusia di dunia, sarana untuk menampilkan kesan, mengekspresikan diri, mempengaruhi orang lain dan mengorbankan diri kita sendiri. Melalui komunikasi manusia membangun hubungan dengan orang lain yang berbeda. Komunikasi adalah sarana mencapai kegiatan bersama, menghubungkan satu dengan yang lain dan alat berbagi ide. Dalam kelompok, organisasi dan masyarakat, komunikasi adalah sarana yang dapat mempertemukan kebutuhan dan tujuan kita sendiri dengan kebutuhan dan tujuan pihak lain. Di dalam organisasi yang lebih besar, masyarakat dan komunitas dunia, komunikasi menyediakan jaringan hubungan yang memungkinkan kita untuk

⁵ Stewart, L. P, dan R. D. Brent 2013, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Rajawali Press. P. 4

⁶ Mulyana, D. 2006. *Ilmu Komunikasi, Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. P. 4

melakukan aksi bersama, pembentukan identitas bersama dan pembangunan kepemimpinan⁷.

1. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Rapat Koordinasi Bersama Kades

Kegiatan pelaksanaan percepatan penanganan bencana covid 19 di kabupaten sumenep terutama di kecamatan Batang-batang dan Bluto dilakukan bersama Tim Satgas Covid-19. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pembekalan dan pemantapan kepada semua kades di Kecamatan setempat untuk berperan aktif melakukan sosialisasi kepada warga tentang manfaat vaksin yang sehat dan halal. Rapat koordinasi ini dilakukan bekal-kali sekaligus juga evaluasi bersama terkait capaian vaksinasi yang telah dilakukan.

Pembinaan oleh pihak Kecamatan dan Tim Satgas Kecamatan kepada kades ini juga seringkali dilakukan dalam acara-acara formal seperti dalam pengukuhan Perangkat desa dan Pengukuran Badan Perwakilan Desa (BPD) se Kecamatan Batang-batang. Dalam kesempatan ini, Camat selalu mewanti-wanti agar Kepala Desa dan Seluruh Perangkat serta BPD terus melakukan langkah-langkah solutif dalam menyikapi persoalan pandemi covid-19 dan juga vaksinasi di desa masing-masing, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan dampak bahaya penyebaran virus covid 19 ini juga sekaligus rendahnya penerimaan warga masyarakat atas program vaksinasi nasional ditengah maraknya pemberitaan-pemberitaan hoaks akibat vaksin tersebut.



Gambar 7.

Kordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 Bersama Camat Batang-batang

2. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Rapat Koordinasi Bersama Tokoh Kiai dan Pimpinan Organisasi Keagamaan

Dalam beberapa kesempatan, Camat Batang-batang bersama Satgas Covid-19 juga melakukan rapat koordinasi bersama para tokoh kiai dan juga pimpinan organisasi keagamaan dalam rangka mensukseskan vaksinasi untuk warga. Dalam forum ini, semua pihak diminta pendapat dan pandangan terkait problem-problem yang menyangkut pelaksanaan vaksinasi untuk kemudian dicarikan solusi bersama.

Rapat koordinasi bersama tokoh ini rutin diadakan di Kecamatan Batang-batang dengan dikoordiner langsung oleh Camat. Selain untuk penyamaan persepsi dan penguatan langkah strategis pelaksanaan vaksinasi, dalam forum ini juga biasa dilakukan evaluasi bersama dalam rangka penguatan gerakan satgas covid-19 dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi.

⁷ Stewart, L. P, dan R. D. Brent 2013, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Rajawali Press. P. 13

Dengan menggandeng para tokoh kiai dan pimpinan organisasi keagamaan ini, Satgas Covid-19 lebih melakukan proses vaksinasi, dimana para tokoh dapat terlibat langsung memberikan penyadaran dan dorongan kepada masyarakat luas untuk ikut vaksin. Kehadiran tokoh kiai dan pimpinan organisasi keagamaan baik di kecamatan batang-batang maupun kecamatan bluto lebih mudah diterima di masyarakat dimana secara kultur, masyarakat di Sumenep pada umumnya masih erat dengan kultur relegius yang selalu menjadikan tokoh kiai dan ustad sebagai rujukan atas setiap permasalahan. Termasuk dalam hal ini permasalahan vaksinasi.



Gambar 8

Sosialisasi program percepatan vaksinasi massal dengan warga masyarakat batang-batang



Gambar 9

Kegiatan Vaksinasi Massal MWC NU di Bluto

3. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberian Hadiah Doorprize

Langkah lain yang dilakukan Satgas Covid-19 dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi di Kecamatan Batang-batang adalah dengan pemberian hadiah doorprize bagi warga yang bersedia melakukan vaksin covid-19. Cara seperti ini dilakukan di Puskesmas Legung Timur, dimana setiap warga yang melakukan vaksin

mendapatkan kupon undian dengan hadiah yang beragama, termasuk hadiah utama berupa sepeda motor.

Cara seperti ini cukup efektif di masyarakat dimana mereka lebih semangat melakukan vaksin. Disamping untuk kesehatan, hadiah doorprize juga menjadi pemicu semangat tersendiri bagi warga setempat. Setidaknya hadiah yang disediakan tim satgas cukup membantu kebutuhan warga di tengah himpitan masalah ekonomi selama masa pandemic covid-19.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemberian Sembako

Salah satu dampak yang cukup serius dalam masa penanganan bencana covid 19 ini adalah stabilitas ekonomi nasional yang ditandai rendahnya tingkat konsumsi nasional sekaligus daya beli masyarakat. Fenomena ini berkaitan dengan beberapa skema aturan pemerintah terkait dengan pembatasan social sekaligus kegiatan-kegiatan yang mendorong aktivitas kerumunan. Bagi para pelaku usaha tentu skema kebijakan ini tentu sangatlah berdampak pada tingkat pendapatan para pedagang dan pelaku usaha yang ada. Fenomena semacam ini tentu juga menjadi tantangan sekaligus pertimbangan pemerintah guna melakukan upaya stimulasi ekonomi masyarakat sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional sebagai bagian dari prioritas nasional yang mendesak guna langkah-langkah pemulihan ekonomi kedepan. Melalui pemberian sembako kepada warga yang bersedia melakukan vaksin juga terjadi di sebagian desa di Kecamatan Batang-batang maupun di kecamatan Bluto. Tujuan juga sama, dalam rangka mendorong warga agar lebih semangat melakukan vaksin. Salah satu desa yang menerapkan cara ini adalah desa Bilangan, dimana kepala desa tidak hanya memberikan contoh dengan melakukan vaksin pertama di desanya, melainkan juga memberikan dorongan kepada warga berupa pemberian sembako kepada warga yang mau divaksin.

Pemberian sembako tersebut diakui kades bilangan karena begitu beratnya mengajak warga untuk ikut vaksin. Walaupun disediakan sembako, memberikan penyadaran dan mengajak warga untuk ikut vaksin juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Persoalannya sama, dimana warga masih banyak trauma dengan pemberitaan hoaks yang sudah banyak menyebar tentang vaksin.



Gambar 10.

Pemberian sembako oleh MWC NU bluto dalam rangka mendorong partisipasi program vaksinasi di kecamatan Bluto

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Testimoni Tokoh Kiai

Cara lain yang juga dilakukan Satgas Covid-19 dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi di Kecamatan Batang-batang adalah dengan melibatkan tokoh kiai sebagai panutan masyarakat untuk ikut serta melakukan vaksin. Tujuan utamanya untuk memberikan percontohan kepada masyarakat agar yang mulanya ragu untuk divaksin menjadi yakin bahwa vaksin aman, sehat dan halal.

Bahkan, dalam ikut serta melakukan vaksin ini, tokoh kiai juga diminta untuk rekaman video berupa testimoni yang berisi ajakan kepada warga untuk ikut vaksin serta menyatakan bahwa vaksin covid-19 aman, sehat dan halal. Video tersebut kemudian disebar luas untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menangkalkan maraknya pemberitaan negatif tentang vaksin, sehingga mereka terdorong untuk ikut vaksin.

PONDOK PESANTREN
AT-TAUFIQIYAH
Sumenep Madura

atfimedia



**VAKSINASI
MASSAL COVID-19**

KH. Imam Hasyim, SH., MH. (Pengasuh PP. AT-Taufiqiyah) menerima suntikan dosis pertama vaksin Covid-19 didampingi oleh Bupati, Kapolres dan Dandim Kab. Sumenep pada tanggal 13 September 2021 di Pondok Pesantren At-Taufiqiyah

Pondok Pesantren Attaufigiyah @pondok_pesantren_attaufiqiyah Atfi Channel



Gambar 11.

penguatan partisipasi masyarakat dalam vaksin melalui testimoni tokoh kyai

6. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Sosialisasi Berbasis Kampung

Dalam rangka mengedukasi dan meyakinkan warga tentang vaksin sehat dan aman, sebagian desa di Kecamatan Batang-batang juga rutin melakukan sosialisasi keliling berbasis kampung dengan mobil informasi. Selain mengajak warga untuk ikut bervaksin, sosialisasi keliling berbasis kampung ini juga memberikan informasi tentang jadwal vaksinasi yang dilaksanakan di Balai Desa.

Salah satu desa yang menerapkan hal ini adalah Desa Batang-batang Daya. dan juga desa Aengbaja raja. Hampir setiap hari mobil desa masuk ke kampung-kampung memberikan informasi seputar vaksin dan ajakan kepada warga untuk ikut bervaksin. Disamping itu, ajakan bervaksin tersebut juga dilakukan melalui pamphlet-pamflet atau meme yang disebar di media sosial dalam rangka untuk menguatkan sosialisasi vaksin. Sebab, rata-rata masyarakat khususnya pemuda saat ini sudah banyak menggunakan HP Android sehingga lebih mudah dalam mengakses informasi.



Gambar 12

Kegiatan vaksinasi berbasis kampung di desa Aengbaja Raja Bluto

7. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Vaksinasi Jemput Bola

Cara lain yang tak kalah penting dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi covid-19 adalah dalam bentuk vaksinasi jemput bola. Hal ini dilakukan sebagian desa di Kecamatan Batang-batang maupun di kecamatan Bluto dengan melibatkan RT dan RW untuk mendata warga di daerahnya yang sudah siap divaksin dengan target jumlah yang ditentukan. Salah satu desa yang menerapkan ini adalah desa Batang-batang Daya dan Desa Aengbaja Raja Bluto

Dalam hal ini, pengurus RT dan RW keliling dari rumah ke rumah warga untuk melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang mau melakukan vaksin. Tujuannya untuk memudahkan layanan vaksinasi kepada warga, dimana mereka tidak harus pergi ke balai desa atau puskesmas untuk divaksin, melainkan cukup di tempat tinggalnya saja. Hal ini dilakukan karena sebagian warga tidak divaksin dengan alasan kesibukan yang membuat mereka tidak sempat ke balai desa atau puskesmas.



Gambar 13

Kegiatan jemput bola vaksinasi ke beberapa warga masyarakat di Desa Aengbaja raja



Gambar 14.

Kegiatan Vaksinasi Ke Lokasi Rumah Warga Di Desa Batang-Batang Daya

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam situasi krisis, manajemen komunikasi publik penting untuk mengurangi kesenjangan (gap) informasi. Pola komunikasi dinamis masyarakat di tengah gempuran teknologi digital, membuat publik mampu mengakses informasi dengan aktif dan cepat. Faktualitas dan aktualitas informasi menjadi kunci penanganan krisis, terlebih lagi dalam situasi pemberitaan hoaks yang begitu massif mendistorsi informasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi publik yang efektif di masa krisis tidak hanya mengandalkan media digital, namun harus mengoptimalkan kombinasi media digital dan konvensional. Misalnya penggunaan jalur komunikasi tradisional atau lokal, media massa, media sosial, aplikasi chat, jaringan kreatif serta jalur pemuka pendapat (opinion leader, influencer), lembaga pendidikan (kampus, sekolah), lembaga keagamaan, sosial, birokrasi lokal (RT, RW), dan sebagainya. Penggunaan saluran komunikasi antar pribadi dan kelompok, serta intervensi komunikasi langsung di lapangan diperlukan, agar dapat menyerap tanggapan masyarakat dan mempercepat penyampaian informasi dari pemerintah.

Melalui jalur komunikasi lintas sektoral diatas dan juga penguatan literasi informasi pada masyarakat tentu akan semakin mendorong langkah-langkah pemerintah dan kelompok relawan dalam percepatan penanganan wabah covid 19 ini kedepan.

2. Saran

Pendekatan kearifan lokal, jalur komunikasi tradisional, dan jejaring lokal. Pemerintah dalam hal ini Satgas Covid 19 Kabupaten Sumenep maupun kelompok relawan perlu terus mengoptimalkan nilai, jaringan, media komunikasi dan pesan kearifan lokal (local wisdom) atau tradisional dalam komunikasi publik. Misalnya menggunakan media komunitas, medium seni, budaya, bahasa, nilai, dan kebiasaan lokal. Juga penggunaan jejaring lokal dengan komunikasi formal dan informal dalam level komunikasi kelompok dan antar pribadi. Misalnya melalui pemuka masyarakat dan agama (local opinion leader), seperti ketua suku (adat), tokoh, ulama dan sebagainya. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi, edukasi dengan dukungan birokrasi (Dinas kesehatan, pertanian, tenaga kerja atau pendidikan lokal, politikus lokal, lurah, RT, RW, penanggung jawab ruang publik, dll), aparat keamanan lokal (kepolisian, militer) serta masyarakat sipil lokal (influencer, kelompok, jejaring atau tokoh relawan). Misalnya kelompok kesehatan (bidan, kader, posyandu), penggerak (PKK, LSM pendidikan), kelompok perempuan (arisan, pengajian), komunitas keagamaan, kelompok kemanusiaan dan lingkungan, jejaring pedagang, serikat pekerja, dan sebagainya. Influencer yang menjadi komunikator pesan harus memiliki kriteria dipercaya atau citra positif di mata publik. Para pihak ini dekat dengan akar rumput (masyarakat) dan dapat diberdayakan sebagai perpanjangan jejaring komunikasi publik pemerintah. Publik Indonesia masih memiliki kepercayaan dan ketergantungan yang tinggi kepada pimpinan tradisional dan jalur komunikasi lokal dalam pembuatan keputusan pribadi dan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kriyantono, Rachmat & Halimatus Sa'diyah. (2018). *Kearifan Lokal dan Strategi Komunikasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lee, Mordecai, Neeley, Grant & Stewart, Kendra (Ed.) 2012. *The Practice of Government Public*
- Little john, 2007. *Teori Komunikasi ; Theories Of Human Communication*. Jakarta : Salemba Humanika
- Milles, MB dan AM Huberman, 1992. *Qualitative Data Analysis ; A Sourcebook Of New Methods*. Beverly Hills : SAGE.
- Mulyana, Deddy, 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006.
- Milles, MB dan AM Huberman, 1992. *Qualitative Data Analysis ; A Sourcebook Of New Methods*. Beverly Hills : SAGE. Hal 80
- Moenawar, M. Ghozalie. (2020). "Menjaga Komunikasi Ketika Publik Sensi: Adaptasi Terhadap Communication Asymmetries". [Video]. Webinar Series #1 UAI : Menjaga Komunikasi Ketika Publik Sensi. Selasa, 9 Juni 2020, 10.00-12.30 WIB via zoom. Jakarta : Prodi Ilmu Komunikasi , Puskakom dan KOMIK Universitas Al Azhar Indonesia, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=c14ekvzbWic>, diakses pada 10 Juni 2020, pk 12.00 WIB
- Sulistyo, Arty Indyah. 2006. "Prinsip Dasar, Perumusan Masalah, dan Pengumpulan Data Penelitian Naturalistik". Makalah. Disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian bagi CPNS-Dosen UNY tahun 2006, pada tanggal 26-27 Desember 2006
- Watari, Doli. (2018). "Belum Optimal, Kemkominfo Ingatkan Lima Tugas Humas Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, April 17, 2018. Diakses dari <http://diskominfo.siakkab.go.id/belum-optimal-kemkominfoingatkan-lima-tugas-humas-pemerintah/2/>, diakses pada 4 Juni 2021, pk. 07.00 WIB